



DPMPTSP



2022

RENJA
Rencana Kerja

**DINAS PENANANMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2022 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPTSP Kota Batam Tahun 2022 disusun mengacu dan konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah sebagaimana dalam rancangan Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2021-2026, serta mengacu pada Teknokratik RPJMD Kota Batam periode 2021-2026. Tatkala penting yang menjadi fokus penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah Kota Batam.

Dalam dokumen perencanaan, Renja OPD merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Batam, Juli 2021
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam


FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680412 198909 1 002

DAFTAR ISI

BAB	I PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	3
1.4.	Sistematika Penulisan	4
BAB	II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	7
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	19
2.4.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB	III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	38
3.3.	Program dan Kegiatan.....	39
BAB	IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	41
BAB	V PENUTUP	50
LAMPIRAN		
~	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022	
~	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022	
~	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022	
~	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022	
~	SK. Kepala DPMPTSP Kota Batam Nomor: KPTS.012/DPMPTSP.01/12/2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2022	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) sebagaimana tertuang di dokumen perencanaan Rencana Strategis. Renja DPMPPTSP Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja disusun sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5 dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD dan RKPD sesuai dengan tugas fungsi DPMPPTSP Kota Batam berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 56 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Proses penyusunan Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

- e. Perumusan Rancangan Akhir;
- f. Penetapan.

Proses penyusunan Renja saat ini telah sampai pada tahapan perumusan Renja di Tahun 2022, dimana proses penyusunan telah melewati lima tahapan dan saat ini telah sampai pada tahap Penetapan Rencana Kerja.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022, masih merupakan penjabaran terhadap pencapaian Target Indikator Tahun 2022 yang tercantum dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, disebabkan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 saat ini sedang dalam proses penyusunan di tahap teknokratik RPJMD 2021-2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Renja, DPMPTSP Kota Batam menjabarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai Perwako Nomor 56 Tahun 2016 serta melaksanakan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam, dimasa ini adalah masa transisi peralihan RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 dan RPJMD periode 2021-2026, sehingga terlihat ada perbedaan kalimat indikator kinerja dan target, namun tetap pada gambaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Batam.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan,

Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan hidup;

3. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan Lingkungan dan hidup;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari :

1. Sekretariat / Sekretaris, terdiri dari Subbag. Program, Subbag. Keuangan dan Subbag. Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Promosi, Data dan Informasi, terdiri dari Kasi. Promosi, Penanaman Modal, Kasi. Data Penanaman Modal dan Kasi. Informasi Penanaman Modal;
3. Bidang Pengawasan, pengendalian dan Pengaduan penanaman modal dan Perizinan, terdiri dari Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Kasi Pengaduan, Fasilitas dan Mediasi, dan Kasi Pengawasan dan pengendalian Perizinan;
4. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, terdiri dari Kasi Perizinan Sosial, Kasi Perizinan Ekonomi dan Kasi Perizinan Penanaman Modal;
5. Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kasi Perizinan Pembangunan, Kasi Perizinan Lingkungan Hidup dan Kasi Perizinan Utilitas.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang digunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Perwako Batam Nomor 56 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DPMPSTP Kota Batam Tahun 2022 ini dibuat dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Menjabarkan rencana kerja Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam jangka pendek yakni 1 (satu) tahun kedepan;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya, serta memperhatikan permasalahan yang ada untuk menjawab isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam pembangunan Daerah Kota Batam di Tahun 2022

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2022 ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam selama 1 (satu) tahun kedepan Tahun 2022;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Di tahun 2020 DPMPTSP Kota Batam melaksanakan belanja langsung yaitu 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp7.810.780.631.34, belanja tidak langsung yang terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp .

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020 masih belum dapat direalisasikan secara maksimal oleh karena minimnya program yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2016-2021, sehingga dalam melaksanakan urusan penanaman modal belum optimal melainkan masih sebatas melaksanakan sub urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sedang pelaksanaan urusan penanaman modal masih perlu ditingkatkan lagi kinerjanya.

Anggaran yang paling besar berada pada Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan sebesar Rp5.224.761.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.245.000 atau sama dengan 0.94%. Hal ini disebabkan pandemik *Covid 19* yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dan pengendalian penanaman modal tidak terlaksana dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, yaitu agar melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing* demi mencegah penularan virus *Covid 19*, disatu sisi kedua kegiatan tersebut pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan para pelaku usaha dalam kegiatan pameran promosi dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

Anggaran Kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik sebesar Rp5.204.205.000 dengan alokasi anggaran sewa gedung sebesar Rp5.170.840.000 dan anggaran tersebut tidak dapat terserap sesuai anggaran yang telah tersedia disebabkan adanya kendala pada pihak pengelola gedung, evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengusulkan rencana pembangunan gedung pemerintah untuk digunakan sebagai tempat perkantoran dan pelayanan terpadu satu pintu, agar tidak diperlukan pengalokasian anggaran sewa gedung di tahun-tahun berikutnya untuk pengelolaan anggaran yang optimal.

Pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 DPMPTSP Kota Batam memetakan program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90/2019, yang terdiri dari 6 (enam) program, 10 (kegiatan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp18.075.587.694 (delapan belas milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). Diharapkan pelaksanaan Renja di tahun 2021 dapat lebih optimal dan sesuai sasaran, tujuan Perangkat Daerah (PD). Kecamatan, Forum OPD hingga Kota, dan proyeksi penerimaan APBD Kota Batam (RKPD) Tahun 2022. Dalam menyusun Ranwal Renja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2022 diusulkan melaksanakan 6 program, 10 Kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran Rp21.540.517.008. maka anggaran urusan penanaman modal dialokasikan sebesar Rp.9.813.365.084

Tahun Anggaran 2020 DPMPTSP Kota Batam melaksanakan program 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.307.027.820.34 dan setelah PAPBD Kota Batam sebesar Rp.7.810.780.631.34, dengan rincian sebagai berikut

:

- I. **Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan**, dengan 3 (tiga) capaian program yakni : *Realisasi Investasi (2.5 T); Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan (2.100 Izin); dan Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP (95%)* anggaran sebesar Rp.5.224.761.000 melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Promosi Penanaman Modal Rp.0, outcome kinerja yakni : meningkatkan minat penanam modal dengan target kinerja 1 laporan rekapitulasi minat penanam modal. Sedangkan output dari kegiatan terlaksananya promosi investasi daerah dalam pameran skala nasional sebanyak 2 kali (200 pengunjung). Kegiatan tidak dapat dilaksanakan oleh karena rasionalisasi anggaran bencana Covid 19;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas Rp.17.250.000.000, outcome kegiatan yakni : Meningkatnya kualitas layanan perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup dengan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat A (82.26-100). Sedangkan output kegiatan penyediaan sertifikat perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Ekonomi dan Sosial Rp.3.306.000, outcome kegiatan yakni : Meningkatnya kualitas layanan perizinan bidang ekonomi dan sosial dengan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat A (82.26-100). Sedangkan output kegiatan berupa pengiriman paket dan barang keperluan kantor sebanyak 300 dokumen dan cetak persetujuan komitmen;
4. Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal Rp.0, outcome kegiatan yakni : Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM secara regular dengan target kinerja (5%). Sedangkan output kegiatan terlaksananya pengawasan, pembinaan dan pengendalian perusahaan/penanaman modal terhadap 200 pelaku usaha. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena rasionalisasi anggaran terdampak bencana Covid 19;
5. Kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik Rp.5.204.205.000, outcome kegiatan yakni : Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan nonperizinan pelayanan terpadu satu pintu dengan target kinerja (33 instansi layanan publik). Sedangkan output kegiatan penyediaan alat listrik dan elektronik (baterai 80 pack); sewa gedung Mal Pelayanan Publik (1 tahun); penyediaan konsumsi tamu

MPP; penyediaan pakaian operasional petugas pelayanan (45 stel);

6. Kegiatan Pemutahiran Data Investasi Rp.0, outcome kegiatan yakni : Meningkatnya kualitas informasi investasi daerah dengan target kinerja (10 propinsi/kab/kota). Sedangkan output kegiatan adalah penyediaan buku profil investasi Kota Batam (200 Buku). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggran terdampak Covid 19.

II. **Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan capaian program Cakupan layanan administrasi perkantoran (100% per tahun) anggaran sebesar Rp. 2.464.161.612.34 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.2.464.161.612.34, outcome kegiatan ini yakni : meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur dengan target kinerja 100%. Sedangkan output kegiatan adalah tersedianya sarana administrasi perkantoran yakni : gaji dan premi asuransi pegawai kontrak (32 orang); penyediaan alat tulis kantor; penyediaan cetak dan penggandaan kop surat, amplop kop dan map tulang; penyediaan materai (8 bulan); penyediaan BBM(3 bulan); penyediaan biaya rekening listrik (1 tahun); sewa mesin fotocopi (1 tahun); dan penyediaan rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah; penyediaan belanja pembayaran pajak kendaraan dinas (6 Unit).

III. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan capaian program *Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah daerah* (1 tahun), anggaran sebesar Rp.84.554.316 melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.0, outcome dari kegiatan ini yakni : meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dengan capaian target kinerja 100%. Sedangkan output kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur berupa pengadaan Notebook/Laptop 1

unit. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena rasionalisasi anggaran terdampak bencana *Covid 19*.

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.84.554.316, outcome kegiatan ini yakni : meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dengan capaian target kinerja 100% per tahun. Sedangkan output dari kegiatan adalah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
3. pembersih, penyediaan jasa servis kendaraan bermotor, penyediaan penggantian suku cadang kendaraan bermotor, dan penyediaan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, dengan Target kinerja kegiatan 100% per tahun.

Uraian anggaran DPMPTSP Kota Batam di tahun 2020 diatas merupakan gambaran adanya perubahan perencanaan dan perubahan target kinerja yang akan dicapai oleh OPD. Dari 9 kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Batam tahun 2020 yang dapat dilaksanakan sesuai PAPBD 2020 adalah 5 kegiatan. Sehingga pada beberapa outcome dan output kegiatan tidak dapat direalisasikan di tahun 2020, meski demikian dalam hal pelayanan terpadu satu pintu tetap diupayakan pelayanan secara maksimal. Gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2020
Tabel 2.4.

Tabel T-C.29

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Kode Rekening	2	3	4	5	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun				9	Praktikan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi	Target Program Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9) 2021	11=(10/4)	
	Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan	Realisasi Investasi; Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Waktu SOP	Rp.9.566.162.922.542; 41.085 Izin; 99%	Rp26.790.734.700.000; 37.360 Izin; 62.22	Rp2.500.000.000.000 ; 2.100 Izin; 95%	Rp14.776.648.300.000 4.509 Izin; 71.10	100 214,71 71.81	Rp3.000.000.000.0 0; 2.100 Izin; 99%	Rp44.567.383.000.00 0 43.974 Izin; 71,10%	465,89 107,03 77,68	
1	Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Meningkatkan penyebaran informasi investasi daerah di dalam negeri (Output: Terselenggaranya promosi potensi daerah)	6 Kali	6 Kali	0 Kali	0 Kali	0%	2 Kali	8 Kali	133,33	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	Tertaksananya operasional pelayanan publik (Output: Tertaksananya pelayanan perizinan bid. lingkungan hidup dan utilitas)	574 Izin	4.849 Izin	500 Izin	738 Izin	135%	600 Izin	6.187 Izin	110,99	
3	Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan Bid. Ekonomi dan Sosial	Menyelenggarakan perizinan ekonomi sosial (Output: Tertaksananya pelayanan perizinan bid. ekonomi dan sosial)	35.511 Izin	32.511 Izin	1.300 Izin	3.776 Izin	177,69%	1.500 Izin	37.360 Izin	105,20	
4	Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menyempatkan LKPM secara reguler	600 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	250%	200	1.200 Pelaku Usaha	200	
5	Kegiatan Operasional Mal Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan pelayanan terpadu satu pintu	33 Instansi pelayanan publik	33 Instansi pelayanan publik	33 Instansi pelayanan publik	33 Instansi pelayanan publik	100%	33 Instansi pelayanan publik	33 Instansi pelayanan publik	100	

Tabel I-C.29

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Praktiran Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
II	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran)	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100%	100% Per Tahun	100% per tahun	100	
			100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100%	100% per tahun	100		
III	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur (Output : Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia)	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	50%	50%	100% per tahun	100%	80
			100%	100%	100%	100%	0%	0%	80%	80	
	2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur	100%	50%	100%	50%	100%	80%	80	

Dari tabel T-C.29 dapat disimpulkan realisasi capaian indikator kinerja ketiga program yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Batam mencapai 93.33%, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2020 di DPMPTSP Kota Batam dari 3 program dan 9 (sembilan) kegiatan terdapat 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang tidak mencapai target hasil/keluaran yang telah ditentukan;
2. Realisasi program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran serta kegiatan penyelenggaraan perizinan bid. Pembangunan lingkungan hidup dan utilitas yang ada pada program peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan dapat mencapai target hasil/keluaran sebagaimana yang ditentukan;
3. Dari 3 (tiga) indikator kinerja program yang ditentukan dalam Renja Tahun 2020 pada program peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan, yaitu Realisasi Investasi mencapai 465.89% dari target dan Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dengan capaian 107.03%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan yakni :
 - a. Penyusunan Renstra periode 2016-2021 belum menggambarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah secara maksimal yang terlihat pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan. dalam pelaksanaan Renja Tahun 2020 DPMPTSP Kota Batam menjadi tahun kedua pelaksanaan perubahan indikator kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya pada tahun 2020 DPMPTSP Kota Batam sedang menyusun Perwako 40/2020 dan Perwako 56/2020 tentang pelimpahan wewenang perizinan dan nonperizinan, dari 71 jenis perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Batam menjadi 154 jenis perizinan dan nonperizinan. Penambahan jumlah jenis perizinan dan

- nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Batam tidak serta merta diikuti dengan penambahan jumlah personil yang dibutuhkan, sehingga proses penelitian berkas di *Back Office* berjalan lambat dan pembentukan Tim Teknis masih belum optimal serta penyusunan SOP perizinan dan nonperizinan yang membutuhkan pembahasan secara menyeluruh dan waktu yang panjang;
- b. Adanya penambahan indikator kinerja pada program peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan yaitu “Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP”, oleh karena itu masih perlu mempersiapkan seluruh sumber daya yang ada untuk bersama-sama mengerahkan upaya pencapaian target kinerja lebih optimal ditahun berikutnya. Selanjutnya banyaknya jumlah perizinan yang tidak dapat diprediksi jumlah permohonan izin yang masuk di tahun 2020 untuk bidang perizinan ekonomi dan social sebanyak 3.776 izin yang ditargetkan 1.300 sehingga total realisasi izin yang terbit mencapai 290.46% dari target yang ditentukan;
 - c. Capaian indikator kinerja program peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan “Realisasi Investasi” dapat terlihat kemajuan yang sangat signifikan terhadap realisasi capaian tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan dengan pelaksanaan aplikasi OSS sebagaimana amanah PP 24/2018, agar menerapkan aplikasi OSS dalam penyelenggaraan perizinan. Data pelaku usaha terintegrasi, sehingga memudahkan pemerintah untuk memantau dan melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Dalam hal ini juga sangat membantu pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra DPMPTS Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program dan kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target hasil/keluaran kegiatan sesuai Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2016-2021 berdampak pada kinerja Perangkat Daerah untuk menganalisis kebutuhan sumber daya dan memaksimalkannya pada pencapaian Renstra di periode berikutnya;
 - b. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran khususnya dan pelaksanaan pelayanan perizinan umumnya;
 - c. Terhadap program yang realisasinya melebihi target sesuai Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2016-2021 berdampak pada kinerja dan penentuan target tahun-tahun selanjutnya.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang dalam internal Perangkat Daerah, dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal. Dalam pelaksanaan kegiatan seluruh kasi dan kasubbag yang menangani kegiatan agar benar-benar memahami pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai target keluaran yang ditentukan;
 - b. Perlu adanya penambahan personil sesuai beban kerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait guna mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada bagian ini diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebaga berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

Indikator Kinerja Utama

I. Realisasi Investasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 dan 2020

Target realisasi investasi di tahun 2019 adalah Rp2.000.000.000.000 capaian realisasi sebesar Rp15.599.574.400.000 atau sebesar 779.97% melebihi target. Sedangkan target realisasi investasi di tahun 2020 sebesar Rp2.500.000.000.000 dengan capaian realisasi sebesar 14.776.648.300.000 atau sebesar 591.06% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan capaian realisasi investasi antara tahun 2019 dan 2020 maka ada penurunan capaian, akan tetapi pencapaian realisasi investasi di Renja tahun 2020 tetap melebihi target. Peningkatan realisasi investasi yang sangat besar dan signifikan ini dikarenakan adanya penghitungan realisasi investasi tidak hanya menghitung realisasi investasi PMDN saja, namun juga menghitung realisasi investasi PMA yang merupakan bagian dari keseluruhan investasi di daerah. Cara penghitungan realisasi investasi ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan realisasi investasi yang ada di daerah dan dapat dipakai sebagai tolok ukur kemajuan maupun kemunduran perekonomian daerah dan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja serta berkurangnya jumlah angka pengangguran di daerah. Dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.2. Data Realisasi Investasi Tahun 2018-2020

Tahun	Target Investasi (Rp)	Realisasi Investasi (Rp)	Capaian (%)	Serapan Tenaga Kerja
2018	225.668.344.742	11.191.160.300.000	4.959.12	
2019	2.000.000.000.000	15.599.574.400.000	779.97	
2020	2.500.000.000.000	14.776.648.300.000	591.06	46.261

- b. Analisis Penyebab Kegagalan/ Keberhasilan/ Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif yang telah dilakukan.

Capaian realisasi investasi di Kota Batam tahun 2020 sebesar Rp14.776.648.300.000 telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000, hal ini didorong oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan realisasi investasi di Kota Batam adalah :

1. Penerapan PP 24/2018 mengguna system OSS, seluruh data SIUP atau NIB pelaku usaha terintegrasi, sehingga memudahkan pemerintah pusat dan daerah memantau pelaksanaan penanaman modal;
2. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota lebih terarah dengan menggunakan 1 (satu) data NIB untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar menyampaikan LKPM, sesuai Perka BKPM Nomor 6/2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha berdasarkan UU Nomor 25/007 tentang Penanaman Modal;
3. Dari jumlah investor yang menyampaikan LKPM PMDN 395 perusahaan dan PMA 466 perusahaan, investasi PMDN terbesar PT. Eco Green Oleo Chemicals sebesar Rp3.000.000.000.000 bergerak di sektor industry bahan kimia dan PT. Pollux Habibie di sektor property dengan investasi sebesar Rp1.000.000.000. Sedangkan investasi PMA PT. Caterillar terbesar sebesar Rp2.000.000.000.000 dan Serapan tenaga kerja di tahun 2020 PMDN sebanyak 13.016 dan PMA sebanyak 33.245 total 46.261 tenaga kerja yang terserap di Kota Batam.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
Indikator Kinerja Utama

- I. Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan

Target jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan di tahun 2020 sebanyak 2.100 Izin dengan capaian realisasi sebanyak 4.514 Izin, hal ini disebabkan adanya penambahan pelimpahan kewenangan jumlah jenis perizinan dan nonperizinan diserahkan Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam melalui Perwako Batam Nomor 40/2020 dan Perwako Batam Nomor 56/2020 serta adanya implementasi PP 24/2018 agar menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis elektronik yaitu dengan menggunakan system OSS.

II. Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP

Target persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP di tahun 2020 ditetapkan 95% dari izin yang terbit sesuai waktu SOP, capaian realisasi hanya mencapai 71.10%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Banyaknya jumlah permohonan perizinan yang diterima, sebagai konsekuensi dari terbitnya Perwako Batam Nomor 40/2020 dan Perwako Batam Nomor 56/2020 yang menambahkan jumlah jenis perizinan diselenggarakan di PTSP;
- b. Jumlah tenaga *back office* yang belum terpenuhi untuk menangani proses penelitian berkas permohonan perizinan yang masuk, sehingga terjadi proses penelitian berkas yang melebihi waktu SOP;
- c. Tim Teknis yang berperan mendukung dan membantu proses perizinan di PTSP dalam memberikan rekomendasi teknis maupun pertimbangan teknis atas jenis izin yang akan diterbitkan belum berjalan maksimal;
- d. Penyusunan SOP sedang dalam tahap proses penyempurnaan dikarenakan banyak jumlah jenis perizinan yang dilimpahkan di PTSP.

3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan analisis isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yakni dengan menyusun Renja sebagai sebuah rangkaian cara jangka pendek dalam kurun waktu 1 (satu) tahun agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai, yakni sebagai berikut :

3.3.1. Tingkat capaian kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Batam

Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2020 yang masuk kategori “Sangat Berhasil” yakni realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan adalah :

- a. Indikator Kinerja Realisasi Investasi, di tahun 2020 mencapai Rp14.776.468.300.000 atau melebihi target sebesar 591.06%.
- b. Indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan, di tahun 2020 mencapai 4.514 Izin atau melebihi target sebesar 214.71%.
- c. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP, di tahun 2020 mencapai 71.10% dari target yang ditetapkan 95% izin yang diterbitkan sesuai waktu SOP, persentase capaian sebesar 71.81% masih terdapat kekurangan capaian realisasi sebesar 27.19%.

Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam tabel T-C.30.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Table. 5.

Table T-C-30

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2019	2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Realisasi Investasi		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kota	Rp225,660,344,742	Rp2,5 T	Rp2,5 T	Rp 3 T	Rp11,020,613,800,000	Rp13,876,404,900,000	Rp3 T	Rp 3 T	Peningkatan yang signifikan pada capaian target indikator kinerja realisasi Investasi disebabkan sejak diberlakukannya aplikasi OSS dalam proses perizinan, sehingga data NIB terintegrasi dan lebih terpantau
2	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			11,300 Izin	1,830 Izin	2,100 Izin	2,100 Izin	2,987 Izin	4,509 Izin	2,100 Izin	2,100 Izin	
3	Persentase Waktu Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP			n.a	90%	90%	90%	65,67%	71,10%	90%	90%	Indikator kinerja ini dinyatakan setelah adanya revisi Renstra di bulan Juni tahun 2019
4	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	100%	100%	100%	100%	
5	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100%	100% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	50%	50%	50%	100%	Dilakukan revisi target indikator kinerja ini oleh karena terbatasnya anggaran pagu DPMPTSP Kota Batam

3.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2020 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah umum dan permasalahan yang tidak terprediksi yaitu :

- a. Kondisi pandemik virus corona Covid 19 di Indonesia mulai merebak maret 2020, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal dan kegiatan pengendalian penanama modal secara tatap muka;
- b. Sulit menghubungi dan bertemu penanggungjawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Tingkat kesalahan pencetakan dokumen bidang perizinan masih diatas 2% belum tercapai secara konsisten pada setiap bulannya;
- d. Ketidakesesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena kekurangan personil *back office* untuk penelitian teknis berkas permohonan izin yang masuk;
- e. Keterlambatan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi bagi jenis perizinan yang dikenai retribusi, yang berakumulasi dengan rentang waktu penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP;
- f. Belum berjalannya *front office* sebagai verifikasi berkas permohonan, layanan informasi dan pengaduan, penyerahan sertifikat izin, *back office* sebagai validasi berkas permohonan dan operator sebagai pencetak sertifikat izin, kondisi ini berakumulasi pada data yang tidak sinkron dengan data register;
- g. Dalam proses pengefektifan izin dengan komitmen masih ada yang dilakukan secara manual dan membutuhkan jenjang alur yang panjang;

- h. Adanya ketidaksesuaian data scan yang diinput oleh pemohon, sehingga memperlambat proses verifikasi berkas;
- i. Pelimpahan izin belum dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi dan belum dilakukan penyesuaian tupoksi DPMPTSP Kota Batam;
- j. Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan atnggal masuk dan tanggal selesai perlu waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin terbit tepat waktu.

3.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kota Batam berkewajiban menyusun perencanaan sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dimana fungsi dan kedudukan RPJMD adalah pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan visi pembangunan daerah Kota Batam “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera” dan isu strategis bidang urusan penanaman modal pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2024 yaitu :

- a. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh PTSP Kota Batam;
- b. Belum sesuai kualifikasi angkatan tenaga kerja lokal dengan pasar tenaga kerja;
- c. Dinamika sosial memengaruhi kepastian dan keamanan berusaha;
- d. Optimalisasi infrastruktur perkotaan dalam konteks peningkatan investasi (lintas sector);
- e. Optimalisasi fungsi Tim Teknis dalam penyelenggaraan PTSP.

Menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah Kota Batam, peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu dalam pembangunan daerah adalah memberikan kontribusi di bidang urusan penanaman modal dan sub urusan PTSP Pemerintah Kota Batam untuk mencapai jumlah perizinan yang diterbitkan dan persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP terus meningkat disetiap tahun dan memastikan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berjalan secara transparan, akuntabel, mudah dan cepat, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha, yang berujung pada hidupnya perekonomian daerah. Dimana di tahun 2019 jumlah izin yang terbit 2.985 izin, yang terbit sesuai waktu SOP sebanyak 62.22% dari target yang ditentukan 95%, dibandingkan tahun 2020 jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.514 izin namun yang sesuai dengan waktu SOP masih 71.10% belum mencapai target dalam Renja 2020. Kinerja pelayanan perizinan di PTSP dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Bidang	Izin Terbit tahun 2019			Izin Terbit tahun 2020		
	Targ et	Realisa si	%	Targ et	Realisa si	%
Bid. Pembangun an & LH	500	681	136.2 0	600	738	123.0 0
Bid. Ekonomi dan Sosial	1.300	2.304	177.2 3	1.500	3.776	251.7 3
Total	1.800	2.985	165.8 3	2.100	4.514	214.7 1

3.3.4. Tantangan dan Peluang

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesejangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu akan mengidentifikasi berbagai factor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan penanaman

modal dan pelayanan perizinan terpadu di tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Faktor internal tersebut dapat berupa kekuatan (*strenghts*) dan berupa kelemahan (*weaknesses*).

1. Kekuatan (Strengths)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemacu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD, dan factor kekuatan yang dimiliki DPMPTSP Kota Batam adalah :

- a. Letak geografis yang strategis;
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai;
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal;
- e. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Disiplin dan kinerja aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih rendah;
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan sub urusan PTSP;

- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Faktor eksternal yang menjadi peluang (*Opportunities*) adalah sebagai berikut :

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor peluang (*opportunities*) DPMPSTP Kota Batam adalah :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional;
- b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi OSS RBA (*Risk Based Approach*);
- c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Batam semakin tinggi;
- d. Iklim investasi di daerah yang kondusif;
- e. Merupakan daerah industri yang memiliki zona KEK dalam rangka memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi investor yang menanam modalnya di zona KEK;

- f. Pertumbuhan UMKM di Kota Batam yang mampu menyerap tenaga kerja;
- g. Penyediaan data potensi dan peluang investasi yang merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan tepat sasaran;
- h. Tersedianya tempat dan even pameran skala nasional dalam rangka promosi peluang investasi Kota Batam.

2. Ancaman (*Threats*)

Isu strategis faktor eksternal yang menjadi Ancaman (*threats*) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD yang merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai berikut :

- a. Regulasi yang terus mengalami perubahan yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan;
- b. Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya;

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain :

- 1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 12 (dua belas) Kecamatan;
- 2. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari Bendahara pengeluaran, PPTK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas;

3. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
 4. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
 5. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan mutu/kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (*Risk Based Approach*);
 6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
 7. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
 8. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
 9. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPSTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
 10. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;
- Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2021;
 2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
 3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPSTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja adalah perencanaan tahunan Dinas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Agar tujuan dan sasaran Dinas tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat segera dilakukan koreksi, jika terdapat penyimpangan arah pelaksanaan.

1. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2020 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengusulkan 3 (enam) program, 9 (sembilan) kegiatan, dimana realisasi fisik dan keuangan secara mencapai 97.11% dengan serapan anggaran sebesar 31.16% dan pada tahun 2021 DPA DPMPSTSP Kota Batam terdapat 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp18.075.587.694, namun dengan adanya perubahan pada penjabaran III dan penjabaran IV terkait adanya Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor :906/923/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah B2LPS, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan FPM dan Dana Insentif Daerah, maka ada perubahan pada sub kegiatan yaitu penambahan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada program Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal di kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tidak mengubah anggaran, hal ini dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (FPM).

2. Penjelasan mengenai catatan penting dimana pada rancangan Awal RKPD karena keterbatasan pagu indikatif yang diberikan, namun pada hasil analisis kebutuhan ada beberapa kegiatan yang harus dianggarkan yaitu, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam DPA DPMPSTSP Kota Batam Tahun 2021 sebesar Rp91.750.000, mengingat perlu sarana dan prasarana penunjang karena beberapa komputer yang sudah berusia hampir 10 tahun dan sebagian anggaran juga dilakukan rasionalisasi untuk *refocusing* terhadap penanganan Covid 19 kondisi Batam yang telah berada di zona hitam, sehingga anggaran yang di-*refocusing* sebesar Rp656.787.931. Selain itu pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di tahun anggaran 2021 tidak dapat dianggarkan dikarenakan kurangnya pagu anggaran DPMPSTSP Kota Batam, namun masih diperlukan untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2022, terkait kelancaran pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan di lapangan. Berikut tabel reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 yaitu tabel T-C.31 di bawah ini :

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2022
 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

RANCANGAN AWAL RKPDP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Batam	1. Persentase Izin Investasi yang dilindakhajuti	5%	184.330.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Batam	Persentase Izin Investasi yang dilindakhajuti	5%	109.400.000	
1.1.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		1.1. Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang dipenuhi	8%	184.330.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang dipenuhi	8%	109.400.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		1.1.1. Jumlah dokumen peta potensi investasi yang tersedia	1 Dokumen	184.330.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Batam	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang tersedia	1 Dokumen	109.400.000	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Batam	2. Persentase Kepeminatan Investasi	90%	381.142.760	Program Promosi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kepeminatan Investasi	90%	309.477.000	
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		2.1. Jumlah Pengunjung Pameran Penanaman Modal	200 Orang	381.142.760	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Jumlah Pengunjung Pameran Penanaman Modal	200 Orang	309.477.000	
			2.2 Rata-rata pengunjng media informasi promosi Investasi	208.152 Pengunjng				Rata-rata pengunjng media informasi promosi Investasi	208.152 Pengunjng		
2.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		2.1.1. Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	2 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	2 Dokumen	157.977.000	
2.1.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		2.1.2. Jumlah Pameran yang diikuti	2 Kali	231.142.760	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pameran yang diikuti	2 Kali	151.500.000	
			2.1.3. Jumlah Promosi melalui media sosial	12 Kali				Jumlah Promosi melalui media sosial	12 Kali		
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	3. Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai waktu SOP	90%	550.100.000	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai waktu SOP		37.270.500	
3.1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		3.1. Tingkat Ketepatan Waktu responsif berjalanya proses perizinan, konsultasi dan pengaduan	90%	550.100.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Ketepatan Waktu responsif berjalanya proses perizinan, konsultasi dan pengaduan		37.270.500	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Batam	3.1.1. Persentase izin yang diterbitkan	90%	423.550.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Batam	Persentase izin yang diterbitkan	90%	21.483.000	Adanya pemindahan rekening belanja gaji tenaga kontrak ke sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
3.1.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		3.1.2. Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	46 Aduan	126.550.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	46 Aduan	15.787.500	Sda
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	4. Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	10%	326.122.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	10%	319.790.800	
4.1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		4.1. Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	10%	326.122.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	10%	319.790.800	
4.1.1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal		4.1.1. Jumlah Data Investasi yang dikelola	4 Laporan	182.122.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Data Investasi yang dikelola	4 Laporan	33.095.600	Anggaran disesuaikan dengan bertambahnya sub kegiatan dalam kegiatan
4.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		4.1.2. Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin Industri dan SIUP yang diawasi	200 Pelaku Usaha	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin Industri dan SIUP yang diawasi	200 Pelaku Usaha	175.725.200	Sub kegiatan sesuai Jukni DAK Non Fisik FPM

4.1.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4.1.3. Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh pembinaan pelaksanaan penanaman modal	300 Izin/SIUP	144.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1200 Izin/SIUP	110.970.000	Diusulkan oleh Bidang Wastu sesuai Juknis pelaksanaan
--------	---	--	---------------	-------------	---	---	----------------	-------------	---

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kesiapan Data Investasi Secara Realtime	70%	88.050.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kesiapan Data Investasi Secara Realtime	70%	86.500.000	
5.1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Terintegrasi Pada Tingkat Daerah		5.1. Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang Disajikan	4 Kali	88.050.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Terintegrasi Pada Tingkat Daerah	Batam	Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang Disajikan	4 Kali	86.500.000	
			5.2. Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang dilaksanakan	1 Kali		Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah	Batam	Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang dilaksanakan	1 Kali		
5.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		5.2.1. Jumlah data perizinan yang dikelola	4.500 Izin	88.050.000	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Batam	Jumlah data perizinan yang dikelola	4.500 Izin	86.500.000	
			5.2.2. Jumlah perizinan yang berbasis informasi yang terintegrasi	153 perizinan/ nonperizinan			Batam	Jumlah perizinan yang berbasis informasi yang terintegrasi	153 perizinan/ nonperizinan		
6.	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	6. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasaan	IKM (Berkategori Baik)	20.030.403.208	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasaan	IKM (Berkategori Baik)	16.926.126.016	
6.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.1. Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10.704.211.148	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	9.410.498.876	
6.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan ASN Tunjangan		6.1.1. Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	532 OB	10.612.981.148	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan ASN Tunjangan		Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	532 OB	9.325.572.876	
6.1.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Petausahan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		6.1.2. Jumlah Kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	324 Kegiatan	91.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Petausahan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	324 Kegiatan	84.926.000	
6.2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	6.2. Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	765.096.500	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	656.068.650	

6.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.2.1. Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	110 Jenis	3.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	110 Jenis	2.600.000	
6.2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.2.2. Jumlah jenis peralatan yang perlengkapan kantor yang disediakan	32 Jenis	142.323.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Jenis	175.018.850	
6.2.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	6.2.3. Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis	85.914.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	880 Jenis	36.520.000	
6.2.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.2.4. Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	32.750.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	31.828.000	
6.2.5.	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		6.2.5. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Jenis	1.800.000	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Kali	1.800.000	
6.2.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6.2.6. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	94 Kali	498.809.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	94 Kali	408.302.000	
6.3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	6.3. Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1.220.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1.187.668.000	
6.3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		6.3.1. Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 Jenis	200.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 Jenis	126.940.000	
6.3.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan		6.3.2. Jumlah jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	5 Unit	540.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan		Jumlah jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	5 Unit	1.060.728.000	Penyesuaian SSH
6.3.3.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		6.3.3. Jumlah jenis kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit	480.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		Jumlah jenis kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit	0	Pindah ke rekening kendaraan operasional
6.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	6.4. Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.104.336.560	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.328.483.290	
6.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat		6.4.1. Jumlah jenis surat menyurat yang disediakan	24 Jenis	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat		Jumlah jenis surat menyurat yang disediakan	24 Jenis	432.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	6.4.2. Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Jenis	1.005.033.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Jenis	913.953.600	
6.4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor		6.4.3. Jumlah jenis jasa perawatan dan perengkapan kantor yang disediakan	24 Jenis	5.416.860.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor		Jumlah jenis jasa perawatan dan perengkapan kantor yang disediakan	24 Jenis	3.012.890.000	
6.4.4.	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6.4.4. Jumlah sasaran pelaksanaan pelayanan umum kantor yang difasilitasi (orang/keompok)	299 OB	681.442.960	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah sasaran pelaksanaan pelayanan umum kantor yang difasilitasi (orang/keompok)	416 OB	1.401.207.690	
6.5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	6.5. Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	236.489.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	343.407.000	
6.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		6.5.1. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	6 Unit	105.679.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	6 Unit	218.230.000	
6.5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.5.2. Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	63.310.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	60.710.000	Penyesuaian SSH
6.5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6.5.3. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	67.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	64.467.000	Penyesuaian SSH

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu juga menyelaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam tahun peralihan antara RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 dan RPJMD Kota Batam periode 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berperan aktif agar pembangunan daerah Kota Batam dapat mencapai target tujuan RPJMD Kota Batam dan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Batam.

Dalam kesempatan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mendukung Visi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Madani yang Modern dan Sejahtera” yang dijabarkan kedalam 5 (lima) dan DPMPSTP Kota Batam melaksanakan Misi 1 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam disusun mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Batam dan kebijakan nasional yaitu program skala prioritas nasional. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik;
2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu **Meningkatnya Investasi.**

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu “*Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah*” dan “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibidang pelayanan Satu Atap*” melalui tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan realisasi investasi Kota Batam dan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Perizinan”

Tabel. 3.1
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2022
1	Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam dan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	10%
2		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dibidang pelayanan perizinan satu atap	IKM A

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah “Meningkatnya realisasi investasi dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan” melalui :

- a. Realisasi Investasi;
- b. Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat.

Tabel. 3.2
Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realiasi Investasi	Rp3.000.000.000.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat	5%

Tabel. 3.3.
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	10%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM A

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan untuk rencana kerja tahun 2022 yang telah diinput pada aplikasi SIPD oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagaimana hasil analisis kebutuhan di Tabel T-C.31 program 6 (enam) dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp109.400.000
2. Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp 309.477.000
3. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp 37.270.500
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp 319.790.800

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 86.500.000
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 5 kegiatan dan 18 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 9.410.498.876;
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 656.926.000
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 1.187.668.000;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 5.328.483.290;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 343.407.000.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022 secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam merupakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dibidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. Jumlah program yang dilaksanakan di tahun 2022 adalah 6 program, 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan, yang terdiri dari 5 program wajib, 10 kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan wajib dan 5 (lima) kegiatan serta terdiri dari 27 sub kegiatan yaitu 9 sub kegiatan wajib dan urusan penanama modal dan 18 sub kegiatan penunjang;
 3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 sebesar Rp 17.788.564.316 dengan perkiraan maju kebutuhan pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp20.925.225.248 dengan sumber dana berasal dari APBD Kota Batam dan DAK.
- a. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”. Terdapat 5 program wajib dan 1 program penunjang, 5 kegiatan wajib dan 5 kegiatan penunjang serta 18 sub kegiatan penunjang dan 9 sub kegiatan wajib, sehingga total 27 sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah di tahun 2022.
 2. Pencapaian Program Skala Prioritas Nasional
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan target yang

harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 5/2021, PP Nomor 6/2021 dan PP Nomor 9/2021, dimana PTSP sedang didorong untuk memberikan layanan perizinan yang cepat, tepat dan mudah bagi pelaku usaha dan memberikan kepastian dalam pemberian layanan, sehingga tercipta iklim investasi yang melayani dan meningkatkan realisasi investasi di daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Implementasi penggunaan aplikasi OSS RBA segera dioptimalkan dalam proses permohonan perizinan dan penanaman modal di daerah.

3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Untuk memperkenalkan potensi investasi di Kota Batam disemua sector perlu adanya promosi yang dilakukan baik keikutsertaan dalam pameran dan sejenisnya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Program yang mendukung antara lain adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal. Diharapkan dengan pelaksanaan promosi secara optimal melalui berbagai media yang ada maka akan dapat meningkatkan nilai investasi di Kota Batam.

4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam sebesar 10%, dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan pencapaian nilai IKM A. Untuk mencapai target ini perlu dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung peningkatan realisasi investasi disetiap tahunnya yaitu dengan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Penanaman Modal, sedangkan untuk mencapai nilai IKM A dibidang pelayanan perizinan maka dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Tabel. 4.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Su Kegiatan
1	Meningkatnya realisasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Kegiatan Penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota
		Program Promosi Penanaman Modal
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pengendalian Penanaman Modal
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
		2
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistim Pelayanan Perizinn Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu		
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPSTSP Kota Batam Tahun 2022 secara garis besar dapat diuraikan yakni :

- ~ Melaksanakan 6 Program, terdiri dari 5 program wajib dan 1 program penunjang;

- ~ Melaksanakan 10 Kegiatan, terdiri dari 5 kegiatan wajib dan 5 kegiatan penunjang;
 - ~ Melaksanakan 27 Sub Kegiatan, terdiri dari 9 sub kegiatan wajib dan 18 sub kegiatan penunjang.
2. Sifat penyebaran lokasi program/kegiatan/sub kegiatan, direncanakan untuk dilaksanakan sifat penyebarannya adalah di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022;
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber PAD adalah sebesar Rp 17.788.564.316
- c. Penjelasan jika Rumusan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD
- Pada rancangan awal RKPD uraian program dan kegiatan serta anggaran sesuai dengan yang tercantum di Renstra DPMPSTSP Kota Batam tahun 2022. Pada analisis kebutuhan juga disesuaikan dengan Renja yang sudah diinput pada system SIPD. Namun seiring dengan pembahasan oleh Dinas dan TAPD serta keterbatasan anggaran terkait pandemic Covid 19 yang masih berlanjut dari tahun 2020, maka terjadi perubahan penambahan sub kegiatan dan pengurangan sub kegiatan dimana ada program pengendalian penanaman modal yang memerlukan uraian sub kegiatan yang lebih rinci, sehingga diperlukan penambahan 1 (satu) sub kegiatan.
- Selain itu usulan program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2022 banyak mengalami perubahan indicator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, dikarenakan disaat bersamaan Pemerintah Kota Batam juga sedang menyusun RPJMD Kota Batam periode 2021-2026, sehingga banyak terjadi penyesuaian-penyesuaian dengan indikator kinerja kota.
- d. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan Tabel. T-C.33
- Berikut adalah penyajian tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Tabel 7.

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Indikator Kinerja	Target Capaian	APBD II	Sumber Dana APBD I	APBN		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Batam	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5%	109.400.000	-	-	-	5%	209.330.000
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	8%	109.400.000	-	-	-	8%	250.000.000
2.18.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Batam	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang tersedia	1 Dokumen Kajian	109.400.000	-	-	-	1 Kajian	200.000.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kepeminatan Investasi	90%	296.400.000	-	-	-	-	400.000.000
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah pengunjung pameran penanaman modal	200 Orang	309.477.000	-	-	-	200 Orang	400.000.000
2.18.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Batam	Rata-rata pengunjung media informasi promosi investasi	208.152 Pengunjung	-	-	-	-	208.152 Pengunjung	-
2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Promosi Penanama Modal Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal	2 dokumen	157.977.000	-	-	-	99%	150.000.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	Jumlah pameran yang diikuti	2 Kali	151.500.000	-	-	-	2.100 Izin IKM A(82-26-100); 100%	250.000.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	Jumlah promosi melalui media sosial	2 Kali	-	-	-	-	90%	123.900.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90%	37.270.500	-	-	-	90%	123.900.000

2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Tingkat Kecepatan Waktu responsif berjalanya proses perizinan, konsultasi dan pengaduan	90%	37.270.500	-	-	Pengalihan rekening belanja gaji tenaga kontrak	90%	123.900.000
--------------	---	-------	---	-----	------------	---	---	---	-----	-------------

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					APBD II	Sumber Dana APBD I	APBN		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatorif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Persentase lzin yang diterbitkan	90%	21.483.000				90%	103.900.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Batam	Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti:	46 Aduan	15.787.500				46 Aduan	20.000.000
			Jumlah layanan konsultasi yang berkategori Baik	50 Layanan					50 Layanan	
2.18.05.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Tingkat Kepuasan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	319.790.800				10%	352.000.000
2.18.05.2.01	Kegiatan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	319.790.800				10%	352.000.000
2.18.05.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah data investasi yang dikelola	4 Laporan	33.095.600				4 Laporan	38.000.000

2.18.05.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembinaan pelaksanaan penanaman modal	200 Pelaku Usaha	175.725.200				200 Pelaku Usaha	170.000.000
2.18.05.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Jumlah pelaku usaha yang memiliki Izin Industri/ SIUP yang diawasi	1200 Izin/ SIUP	110.970.000				300 Izin/ SIUP	144.000.000

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022								Praktiran Maju Rencana Tahun 2023		
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
					APBD II	APBD I	APBN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kesiapan Data Investasi secara Realtime	70%	88.050.000	-	-	-	70%	88.050.000			
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang disajikan	4 Kali	88.050.000	-	-	-	4 Kali	88.050.000			
			Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Yang dilaksanakan	1 Kali					1 Kali				
2.18.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Jumlah data perizinan dikaldu	4.500 Izin	88.050.000	-	-	-	4.500 Izin	88.050.000			
2.18.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Tingkat Kepuasan Pelayanan Keadinasan	IKM (Berkategori Baik)	20.030.403.208	-	-	-	IKM (Berkategori Baik)	20.030.403.208			
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	100%	10.704.481.148	-	-	-	100%	10.704.481.148			
2.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah ASN yang digaji dan diberitunjangan	532 OB	10.612.981.148	-	-	-	532 OB	10.612.981.148			
2.18.01.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah kegiatan yang dilatrusahkan dalam 1 tahun	324 Kegiatan	91.500.000				324 Kegiatan	91.500.000			

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Praktiaraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
			4	5	6	7	8		9	10	11		
1	2	3											
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	765.096.500						100%	731.668.000	
2.18.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Batam	Jumlah jenis ketersediaan komponen instalasi listrik	110 Jenis	3.500.000						110 Jenis	3.500.000	
2.18.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Jenis	142.323.500						32 Jenis	150.000.000	
2.18.06.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Batam	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	9724 Jenis	85.914.000			Adanya perpindahan rekening belanja BBM			9724 Jenis	38.000.000	
2.18.06.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	32.750.000						7 Jenis	39.568.000	
2.18.06.2.06.06	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Batam	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Jenis	1.800.000						12 Jenis	1.800.000	
2.18.06.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Batam	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	94 Kali	498.809.000						94 Kali	498.809.000	
2.18.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1.220.000.000						100%	200.000.000	
2.18.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Batam	Jumlah jenis kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	480.000.000						0 Unit	0	
2.18.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah jenis kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	5 Unit	540.000.000						0 Unit	0	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Sumber Dana	APBD I	APBN		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.01.2.07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	8 Jenis	200.000.000				16 Jenis	200.000.000
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.104.336.560	-	-		100%	7.606.033.600
2.18.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang diadakan	24 Jenis	1.000.000				60 Jenis	1.000.000.
2.18.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	36 Jenis	1.005.033.600				36 Jenis	1.005.033.600
2.18.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Jenis	5.416.860.000				24 Jenis	5.150.000.000
2.18.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah sasaran pelaksanaan jasa pelayanan umum yang difasilitasi	299 OB	681.442.960	-	-		416 OB	1.450.000.000
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	236.489.000	-	-		100%	219.100.000
2.18.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	6 Unit	105.679.000				6 Unit	120.000.000
2.18.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	63.310.000				3 Unit	69.100.000
2.18.01.2.09.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	67.500.000				1 Unit	30.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Akhir Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022 mengusulkan 6 program, 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 17.788.564.316 Usulan anggaran pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan terlihat ada perbedaan anggaran antara pagu dan hasil inputan di aplikasi SIPD, hal ini disebabkan

beberapa faktor yaitu:

- ~ adanya perbedaan harga satuan baik pada SSH dan SBU;
- ~ adanya perubahan volume yang direncanakan;
- ~ Adanya perpindahan rekening belanja antar program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu rekening belanja gaji tenaga kontrak, dalam perencanaan awal dan akhir anggaran belanja gaji tenaga kontrak masih berada di masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai penempatan tenaga kontrak, namun setelah dilakukan evaluasi terdapat berbagai kendala dalam pembayaran gaji tenaga kontrak apabila dianggarkan secara terpisah. Hal ini disebabkan ketidaksiapan sumber daya aparatur dalam mengelola anggaran secara terpisah melalui bendahara pengeluaran pembantu unit.

Meski demikian pada prinsipnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam telah berupaya dengan maksimal menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Batam dapat bermanfaat bagi kemajuan kota dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kota Batam.

Pada akhirnya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022 merupakan pedoman dan pengontrol serta sangat membantu Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Batam untuk memastikan arah kinerja perangkat daerah sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah Pemerintah Kota Batam.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2022

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Profilan Maju Rencana Tahun 2023		
			Kelebihan Sub Kegiatan	Terdapatnya honorarium pejabat pengelola keuangan SKPD DPMPTSP Kota Batam			Target Capaian Kinerja	Kelebihan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Kelebihan Dan/ Pagu Indikatif (Rp.)	
															Program
2															
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									21.560.147.968					
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									20.030.403.208					
2	18 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.704.481.148					
2	18 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Dana				
2	18 01 202 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								105.12.981.148	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	18 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah								91.500.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				
2	18 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								765.096.500					
2	18 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor								3.500.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				
2	18 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								142.323.500	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				
2	18 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								85.914.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				
2	18 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								32.750.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				
2	18 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								1.800.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				
2	18 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								498.809.000					
2	18 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								1.220.000.000					
2	18 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								480.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				
2	18 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								540.000.000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Target Capaian Kinerja	Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja		
												Target	Tolok Ukur	
2	18 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.104.336.560						0
2	18 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor			Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun	1.000.000 (PAD)					0
2	18 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya arus listrik di Kantor DPMP/PTSP Kota Batam Tersedianya layanan internet di Kantor DPMP/PTSP Kota Batam Tersedianya layanan telepon di Kantor DPMP/PTSP Kota Batam			Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1.005.033.600 (PAD)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sewa gedung Kantor DPMP/PTSP, sewa mesin fotocopi			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun	5.416.860.000 (PAD)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji tenaga kontrak DPMP/PTSP Kota Batam Tersedianya peralatan bahan pembersih kantor			Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun 1 Tahun	681.442.960 (PAD)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						236.489.000						0
2	18 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun	105.679.000					0
2	18 01 209 06	Pemeliharaan Perubahan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor			Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun	63.310.000 (PAD)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya mesin penghunam dan penghunam kantor			Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun	67.500.000 (PAD)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KLIM PENANAMAN MODAL						184.330.000						0
2	18 02 202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						184.330.000						0
2	18 02 202 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya pemetaan peluang potensi investasi daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	184.330.000 (PAD)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						381.142.760						0
2	18 03 201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						381.142.760						0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Batam
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.00.00.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELUANGAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.00.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELUANGAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikan Hajat Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Target Capaian Kinerja Program Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)				Target Ukur	Target	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		150.000.000 (PAU)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		2 kali		231.142.760 (PAU)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				550.100.000					0
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				550.100.000					0
2	18	04			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				423.550.000 (PAU)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Batam, Batam Kota, Belian	1 Tahun		126.550.000 (PAU)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				326.122.000					0
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				326.122.000					0
2	18	05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				182.122.000 (PAU)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				0
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun		144.000.000 (PAU)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				0
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				88.050.000					0
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				88.050.000					0
2	18	06			Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				88.050.000 (PAU)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)				0
TOTAL									21.560.147.968					0

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN						21,560,147,968						0		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						20,030,403,208						0		
2	18 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10,704,481,148	Kota Batam, Batam Kota, Belian					0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1 Tahun		10,612,981,148	Kota Batam, Batam Kota, Belian				1 Tahun	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 202 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Tahun		91,500,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian				1 Tahun	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah					765,096,500						0		
2	18 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pererangan Bangunan Kantor			12 Bulan		3,500,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian				12 Bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Paket		142,323,500	Kota Batam, Batam Kota, Belian		03. Peningkatan kualitas SDM Yang Unggul dan Bermartabat di Mairland dan Hinterland		1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1 Tahun		85,914,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1 Tahun		32,750,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian				1 Tahun	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang- undangan			1 Tahun		1,800,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian				1 Tahun	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			1 Tahun		498,809,000	Semua Kab/Kota				1 Tahun	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktekan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktekan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
2 18 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,220,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II				1 Unit	480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			03. Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul dan Bermartabat di Mairland dan Hinterland	1 Unit		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda EmpatDPMPTSP Kota Batam Tersedianya Kendaraan Operasional Roda Dua DPMPTSP Kota Batam				1 Unit 2 Unit	540,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian					1 Unit 2 Unit		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Acces Point Tersedianya Hub Tersedianya Intocus/Proyektor Tersedianya Komputer PC All In One Tersedianya Mesin Fotocopi Tersedianya Printer Tersedianya Scanner Tersedianya Ultrabook				1 Unit 2 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	200,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit 2 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7,104,336,560								0	
2 18 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor				1 Tahun	1,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			03. Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul dan Bermartabat di Mairland dan Hinterland	1 Tahun		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2 18 02 202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						184,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 02 202 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya pemetaan peluang potensi investasi daerah				1 Paket	184,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul dan Bermartabat di Mairland dan Hinterland	1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						381,142,760					0			
2 18 03 201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						381,142,760					0			
2 18 03 201 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					1 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul dan Bermartabat di Mairland dan Hinterland	1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 03 201 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kegiatan promosi potensi investasi daerah				2 Kali	231,142,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul dan Bermartabat di Mairland dan Hinterland	2 Kali	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						550,100,000					0			
2 18 04 201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						550,100,000					0			
2 18 04 201 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Keharmonisan Ciptakan	Tersedianya Layanan Perizinan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial;				1 Tahun	423,550,000	Kota Batam, Batam Kota, Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif			
2 18 06 201 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya profil Investasi daerah				1 Tahun	88.050.000	Kota Batam, Semua kecamatan, DAERAH (PAD) Semua kelurahan			1 Tahun	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TOTAL							21.560.147.968					0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktiara Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendaan		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiara Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					21,560,147,968								0	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														0
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10,704,211,148							0	
2	18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digej dan diberi tunjangan				532 Orang/Bulan	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				532 Orang/Bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditaatiskan dalam 1 tahun				324 Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				324 Kegiatan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					765,087,500							0	
2	18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				110 Jenis	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				32 Jenis	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bernabab di Mainland dan Hinterland			32 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan				9724 Jenis	Semua Kab/Kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9724 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				7 Jenis	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				12 Jenis	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Panggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan				94 Kali		498,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Matherland dan Hinterland		94 Kali		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,214,740,520								0
2 18 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan				1 Unit		498,577,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Matherland dan Hinterland	1 Unit		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan				5 Unit		607,163,000	Kota Batam, Batam Kota, Batam					5 Unit		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				8 Jenis		109,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Jenis		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							7,402,662,640								0
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang diadakan				24 Jenis		432,000	Kota Batam, Batam Kota, Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Matherland dan Hinterland	24 Jenis		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				36 Jenis		1,005,033,600	Kota Batam, Batam Kota, Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36 Jenis		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				24 Jenis		5,416,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Jenis		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2022**

Kode	Usuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum yang difasilitasi				299 Orang Bulan	980,337,040	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Mainland dan Hinterland	299 Orang Bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194,392,200					0			
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan, jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan				6 Unit	108,792,200	Kota Batam, Batam Kota, Belian		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Mainland dan Hinterland	6 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				3 Unit	69,100,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Mainland dan Hinterland	3 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperihar/ di- rehabilitasi				1 Unit	16,500,000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Mainland dan Hinterland	1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						109,400,000					0			
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						109,400,000					0			
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang tersusun				1 Dokumen Kajian	109,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat di Mainland dan Hinterland	1 Dokumen Kajian	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						296,400,000					0			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RJMID	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Perangung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023				
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						326,141,000									0	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah data investasi yang dikelola				4 Laporan	36,474,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bernarabat di Mainland dan Hinterland		4 Laporan			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembinaan pelaksanaan penanaman modal				200 Pelaku usaha	131,082,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				200 Pelaku usaha			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin industri/ SIUP yang diawasi				1200 Izin/ SIUP	158,585,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bernarabat di Mainland dan Hinterland		1200 Izin/ SIUP			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						88,050,000									0	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						88,050,000									0	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan yang dikelola Jumlah perizinan yang berbasis informasi terintegrasi				4500 Izin 153 Perizinan	88,050,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4500 Izin 153 Perizinan			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TOTAL							21,560,147,968									0	



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 012 /DPMPTSP.01/12/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2019-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020;
21. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Renstra OPD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2022 dimaksud dalam diktum KESATU,

melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



FIRMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680412 198909 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM TAHUN
ANGGARAN 2022


SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB
3.	KASUB.BAG. PERENCANAAN DAN PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM	SEKRETARIS
1	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENANAMAN MODAL	
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KABID. PROMOSI, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR
2.	KASI. PROMOSI PENANAMAN MODAL	ANGGOTA
3.	KASI. DATA PENANAMAN MODAL	ANGGOTA
4.	KASI. INFORMASI PENANAMAN MODAL	ANGGOTA

II		PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	
1	SEKRETARIS	KOORDINATOR	
2.	KASI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	ANGGOTA	
3.	KASI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN	ANGGOTA	
4.	KASI. FASILITASI, PENGADUAN DAN KONSULTASI SERTA MEDIASI	ANGGOTA	
III		PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERIZINAN EKONOMI DAN SOSIAL	
1	KABID. PERIZINAN EKONOMI DAN SOSIAL	KOORDINATOR	
2	KASI PERIZINAN EKONOMI	ANGGOTA	
3	KASI. PERIZINAN SOSIAL	ANGGOTA	
4	KASI. PERIZINAN PENANAMAN MODAL	ANGGOTA	
IV		PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	KABID. PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINATOR	
2	KASI. PERIZINAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
3	KASI. PERIZINAN UTILITAS	ANGGOTA	
4	KASI. PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	

V	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT	
	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KASUB.BAG. UMUM KEPEGAWAIAN	KOORDINATOR
2	KASUB. BAG. KEUANGAN	ANGGOTA
3	PELAKSANAAN SUB.BAG. PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA

Batam, 29 Desember 2020
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BATAM


 FIRMAN SYAH
 Pembina Utama Muda
 NIP/19680412 198909 1 002